

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kondisi geografis dan geologis yang kompleks, berada di wilayah khatulistiwa yang diapit dua benua dan dua samudra, serta terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana diartikan sebagai suatu kejadian yang menimbulkan ancaman dan gangguan kepada kehidupan masyarakat yang disebabkan alam serta nonalam sehingga dapat menyebabkan korban jiwa, dampak psikologis, kerugian harta benda serta kerusakan lingkungan.

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah kejadian bencana alam di Indonesia menunjukkan tren yang berfluktuasi dari waktu ke waktu. Pada tahun 2022, terdaftar sejumlah 3.544 peristiwa bencana yang melanda berbagai wilayah di Indonesia. Angka ini meningkat secara signifikan pada tahun 2023, dengan jumlah kejadian mencapai 5.400 bencana. Namun, pada tahun 2024, jumlah kejadian bencana mengalami penurunan menjadi 2.107 kejadian bencana. Meskipun demikian, penurunan ini tidak serta-merta menunjukkan penurunan risiko, melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor cuaca, pola iklim, serta upaya mitigasi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan.

Menurut data terbaru yang disampaikan oleh Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, tercatat bahwa sepanjang periode

1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024 terjadi berbagai peristiwa bencana di Indonesia yang didominasi oleh bencana banjir, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 1 Jumlah Kejadian Per-Jenis Bencana Periode Tahun 2024

Jenis Bencana	Jumlah Kejadian
Gempa Bumi	19
Erupsi Gunung Berapi	5
Banjir	1088
Cuaca Ekstrem	455
Karhutla	337
Tanah Longsor	135
Kekeringan	54
Gelombang Pasang dan Abrasi	14

Sumber: Youtube BNPB Indonesia, 2025

Jika dibandingkan dengan seluruh provinsi di Pulau Jawa, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menerangkan bahwa Provinsi Jawa Tengah menempati posisi kedua teratas dalam jumlah kejadian banjir selama kurun waktu 2021 hingga 2024. Posisi ini berada di bawah Provinsi Jawa Barat yang secara konsisten mencatat jumlah kejadian terbanyak. Sementara itu, provinsi lain seperti Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta mencatat jumlah kejadian yang relatif lebih rendah. Perbandingan jumlah kejadian banjir di provinsi-provinsi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 2 Jumlah Kejadian Bencana Banjir di Pulau Jawa

Provinsi	2021	2022	2023	2024	Total
Jawa Barat	247	185	107	79	893
Jawa Tengah	153	181	95	71	660
Jawa Timur	149	153	41	86	525
Banten	57	52	28	34	333
DKI Jakarta	20	10	7	10	213
DI Yogyakarta	6	7	24	0	103

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Melihat tingginya frekuensi kejadian banjir, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan penanggulangan banjir sebagai prioritas utama dalam pengurangan risiko bencana sejak tahun 2021. Hal ini tertuang dalam dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Jawa Tengah 2022 - 2026. Berikut adalah matriks amatan prioritas bencana di Provinsi Jawa Tengah:

Tabel 1. 3 Matriks Prioritas Bencana Provinsi Jawa Tengah

PRIORITAS PENANGANAN RISIKO BENCANA		KELAS RISIKO BENCANA		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
KECENDERUNGAN KEJADIAN BENCANA	MENURUN		Kegagalan Teknologi	Letusan Gunungapi Ungaran
	TETAP	Covid-19, Epidemi dan Wabah Penyakit	Letusan Gunungapi Lawu, Letusan Gunungapi Sumbing	Gempabumi, Letusan Gunungapi Dieng, Letusan Gunungapi Merbabu, Letusan Gunungapi Slamet, Letusan Gunungapi Sundoro, Tanah Longsor, Tsunami
	MENINGKAT		Gelombang Ekstrem dan Abrasi,	Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kekeringan, Likuefaksi, Letusan Gunungapi Merapi

Sumber: BNPB, 2021

Adapun persebaran wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan peluang bahaya banjir adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Data Potensi Bahaya Banjir di Jawa Tengah Berdasarkan Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Luas Bahaya				Kelas
	Rendah (Ha)	Sedang (Ha)	Tinggi (Ha)	Total (Ha)	
Cilacap	2,384	39,756	52,228	94,369	Tinggi
Banyumas	420	12,281	11,850	24,551	Tinggi
Purbalingga	166	2,711	3,322	10,509	Sedang
Banjarnegara	58	2,140	3,060	5,267	Tinggi
Kebumen	2,017	19,149	29,311	51,011	Tinggi
Purworejo	837	14,575	16,600	31,912	Tinggi
Wonosobo	0	606	1,491	2,097	Tinggi
Magelang	16	3,967	1,929	5,902	Tinggi
Boyolali	38	2,367	6,221	8,627	Tinggi
Klaten	322	11,507	9,701	21,598	Tinggi
Sukoharjo	747	16,210	11,027	27,844	Tinggi
Wonogiri	48	9,528	2,644	15,200	Tinggi
Karanganyar	109	5,150	2,306	7,565	Sedang
Sragen	635	18,130	13,390	33,705	Tinggi
Grobogan	2,205	47,826	38,845	68,876	Tinggi
Blora	595	27,488	18,007	45,988	Tinggi
Rembang	146	12,321	7,021	21,489	Tinggi
Pati	1,342	31,670	32,587	65,598	Tinggi
Kudus	293	7,922	12,225	20,440	Tinggi
Jepara	152	11,805	20,221	22,271	Tinggi
Demak	944	27,008	53,960	81,913	Tinggi
Semarang	18	3,585	2,699	6,302	Tinggi
Temanggung	5	2,117	762	2,883	Tinggi
Kendal	0	7,455	18,115	34,180	Tinggi
Batang	221	3,135	4,107	10,072	Tinggi
Pekalongan	572	12,375	70,119	23,086	Tinggi
Pemalang	1,057	22,019	14,527	37,602	Tinggi
Tegal	486	7,687	8,850	26,227	Tinggi
Brebes	1,865	41,938	36,407	80,209	Tinggi
Kota					
Kota Magelang	0	68	72	140	Tinggi
Kota Surakarta	101	2,089	894	3,084	Sedang
Kota Salatiga	0	58	45	103	Tinggi
Kota Semarang	337	7,592	3,440	11,368	Tinggi
Kota Pekalongan	125	2,334	1,719	4,178	Tinggi
Kota Tegal	149	1,836	1,632	3,616	Tinggi
Provinsi Jawa Tengah	19,340	469,909	446,255	935,504	Tinggi

Sumber: BNPB, 2021

Dari data di atas diketahui bahwa seluruhnya ukuran ancaman banjir di Provinsi Jawa Tengah adalah 935.504 Ha dan berkedudukan di golongan tinggi. Luas ancaman banjir dapat dikelompokkan dalam 3 kelas bahaya, yakni golongan bahaya rendah seluas 19.340 Ha, kelas sedang seluas 469.909 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya banjir pada kelas tinggi seluas 446.255 Ha. Kabupaten/kota yang Kabupaten Cilacap memiliki luas wilayah terbesar untuk kategori bahaya banjir kelas rendah, yaitu 2.384 hektare. Untuk kategori bahaya banjir kelas sedang, luas terbesar terdapat di Kabupaten Grobogan dengan 47.626 hektare, sedangkan pada kategori bahaya banjir kelas tinggi, Kabupaten Demak menempati posisi teratas dengan luas 53.960 hektare.

Selain data dari dokumen kajian resiko bencana Jawa Tengah yang diterbitkan oleh BNPB, (2023) yang menyatakan Kabupaten Demak berpotensi tinggi bahaya banjir, Indeks Resiko Bencana Indonesia 2022 juga menggambarkan Kabupaten Demak tergolong ke dalam kelas daerah resiko tinggi terhadap bencana banjir dengan menempati urutan ke 244 dari 397 kabupaten/kota di Indonesia dengan indeks 19,76, lebih tinggi dari kota dan kabupaten sekitarnya yaitu Kota Semarang dengan indeks 17,35 dan Kabupaten Kudus dengan indeks 16,96.

Kabupaten Demak sendiri merupakan wilayah pesisir utara yang secara geografis berada pada kawasan dataran rendah pesisir dan wilayah delta. Topografi wilayah yang relatif datar serta keberadaan sistem sungai aluvial utama, seperti Sungai Tuntang, Jragung, dan Serang–Lusi, menjadikan Demak memiliki kerentanan tinggi terhadap banjir. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh berbagai permasalahan lingkungan, antara lain sedimentasi sungai, intrusi air laut, serta penurunan muka tanah. Pada musim hujan, peningkatan debit air dari wilayah hulu kabupaten sekitar kerap melampaui kapasitas sungai di wilayah Demak, sehingga banjir bersifat kronis dan berulang.

Kerentanan banjir di Kabupaten Demak juga diperkuat oleh kondisi infrastruktur pengendali banjir yang belum sepenuhnya andal. Berdasarkan yang disampaikan oleh Plt Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinputaru) Demak dalam laporan Kompas Regional (2025), tercatat sedikitnya 28 titik tanggul sungai di Kabupaten Demak berada dalam kondisi kritis, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

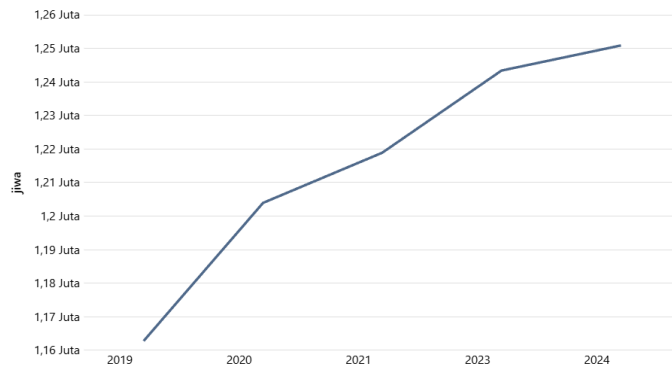
Tabel 1. 5 Kondisi Tanggul Sungai di Kabupaten Demak

No	Nama Sungai	Lokasi	Kondisi
1.	Sungai Tuntang	Desa Pilangwetan	Tanggul longsor 30 meter
2.	Sungai Tuntang	Desa Pulosari	Tanggul longsor 45 meter
3.	Sungai Tuntang	Desa Doreng	Tanggul longsor 200 meter
4.	Sungai Tuntang	Desa Gebangarum	Limpas
5.	Sungai Setu	Desa Karangawen	Limpas
6.	Sungai Setu	Desa Banjarejo	Limpas
7.	Sungai Setu	Wonorejo	Limpas
8.	Sungai Setu	Desa Sidokumpul	Limpas
9.	Sungai Setu	Desa Gaji	Limpas
10.	Sungai Setu	Desa Tangkis	Limpas
11.	Sungai Setu	Desa Krandon	Limpas
12.	Sungai Setu	Desa Batu	Limpas
13.	Sungai Setu	Desa Donguter	Limpas
14.	Sungai Cabean	Desa Rejosari	Tanggul longsor
15.	Sungai Cabean	Desa Banjarsari	Tanggul longsor
16.	Sungai Cabean	Desa Tlogoweru	Tanggul longsor
17.	Sungai Jragung Lama	Desa Rejosari	Limpas
18.	Sungai Jajar	Desa Dempet	Limpas
19.	Sungai Jajar	Kelurahan Bintoro	Limpas
20.	Sungai Dombo	Desa Jamus	Palung sungai dangkal
21.	Sungai Dombo	Desa Menur	Palung sungai dangkal
22.	Sungai Dombo	Desa Wringinjajar	Palung sungai dangkal
23.	Sungai Dombo	Desa Karangasem	Limpas
24.	Sungai B-1 Sistem Jragung	Desa Guntur	Kritis
25.	Sungai B-1 Sistem Jragung	Desa Bakalrejo	Kritis
26.	Sungai B-1 Sistem Jragung	Desa Donorejo	Kritis
27.	Sungai Wulan	Desa Gempolsongo	Kritis
28.	Sungai Jajar	Desa Singorejo	Limpas

Sumber: Telah diolah kembali dari Kompas.com, 2025

Kerentanan fisik tersebut diperkuat oleh dinamika demografis dan tata guna lahan. Menurut (databoks katadata, 2025) jumlah penduduk di Kabupaten Demak

terus mengalami kenaikan sejak tahun 2019, sebagaimana terlihat pada grafik berikut:



Grafik 1. 1 Kenaikan Jumlah Penduduk di Kabupaten Demak Tahun 2019-2024

Sumber: Databoks Katadata, 2025

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa sejak tahun 2019 hingga tahun 2024 penduduk di Kabupaten Demak terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2024 berjumlah sebanyak 1,25 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi seiring dengan perkembangan ekonomi daerah mendorong meningkatnya kebutuhan akan hunian. Pembangunan kawasan permukiman baru terus berkembang dan menyebar hingga menjangkau wilayah-wilayah yang secara ekologis tidak layak untuk dihuni, termasuk kawasan rawan banjir. Situasi tersebut menjadikan dinamika demografis sebagai salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya tingkat kerentanan Kabupaten Demak terhadap bencana.

Berdasarkan penggunaan lahannya, wilayah Kabupaten Demak didominasi oleh lahan persawahan sebesar 59,72 persen, diikuti oleh pertanian non-padi sebesar 21,1 persen, serta kawasan permukiman yang berkembang pesat sebesar 19,17 persen. Permukiman ini tersebar dalam kluster perkotaan dan pedesaan,

dengan konsentrasi signifikan di Kecamatan Sayung, Karanganyar, dan Karangawen, yang secara historis merupakan wilayah dengan tingkat kejadian banjir yang tinggi. Publikasi Kabupaten Demak dalam Angka Tahun 2024 menunjukkan bahwa pengembangan permukiman perkotaan secara signifikan terkonsentrasi di kecamatan-kecamatan rawan banjir, seperti Mranggen (7,8 persen), Karangawen (8,2 persen), dan Kecamatan Demak (6,3 persen) dari total luas wilayah kabupaten.

Wilayah-wilayah tersebut ditetapkan sebagai kawasan permukiman perkotaan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Demak berdasarkan pertimbangan kepadatan penduduk dan intensitas aktivitas ekonomi. Penetapan ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011–2031. Namun demikian, konsentrasi pembangunan permukiman di wilayah rawan banjir menunjukkan adanya tantangan dalam pengendalian pemanfaatan ruang, yang berimplikasi langsung terhadap peningkatan risiko bencana dan menegaskan pentingnya pengelolaan tata ruang dan kebencanaan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Dampak nyata dari tingginya kerawanan banjir terlihat pada Dokumen Kajian Risiko Bencana Daerah mencatat bahwa dari tahun 1815 hingga 2015 menunjukkan bahwa Kabupaten Demak mengalami 36 peristiwa bencana besar, dengan cuaca ekstrem dan banjir menyumbang sekitar 65,79% dari total kejadian. Peristiwa-peristiwa ini menyebabkan kerugian manusia dan material yang signifikan, termasuk lebih dari 7.000 rumah rusak dan lebih dari 14.000 hektar lahan

terdampak. Data terbaru dari tahun 2015 hingga 2021 menunjukkan peningkatan frekuensi bencana, dengan Kabupaten Demak mencatat rata-rata 98 peristiwa bencana per tahun dan puncak 174 insiden pada tahun 2017. Bencana yang paling sering terjadi selama periode ini adalah kekeringan, peristiwa cuaca ekstrem, dan banjir tahunan. Berdasarkan Penilaian Risiko Bencana untuk periode 2016–2020, Demak tetap sangat rentan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, dan erosi pesisir.

Kejadian bencana banjir di Kabupaten Demak terbaru terjadi dua kali, yaitu pada bulan Februari dan Maret 2024. Bencana banjir di Kabupaten Demak terjadi pada awal bulan Februari 2024 yang disebabkan oleh tingginya intensitas hujan pada daerah hulu sehingga menyebabkan jebolnya beberapa titik tanggul sungai, air kemudian mengalir ke area pemukiman warga. Pada tanggal 6 Februari 2024 Bupati Demak merespon bencana banjir tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 360/44 Tahun 2024 untuk menaikkan status bencana menjadi status tanggap darurat yang berlaku selama 2 pekan sejak tanggal 6 sampai 19 Februari 2024. Adapun peta persebaran wilayah terendam banjir pada bulan Februari atau fase 1 dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 1. 1 Infografis Bencana Banjir Fase 1 Per 8 Februari 2024

Sumber: Instagram BPBD Kabupaten Demak, 2024

Berdasarkan infografis di atas dapat menerima informasi bahwa banjir fase 1 merendam 7 kecamatan dari 14 kecamatan di Kabupaten Demak, meliputi Kecamatan Wonosalam, Karanganyar, Gajah, Karangtengah, Karangawen, Dempet, dan Kebonagung. Banjir fase 1 mengakibatkan 84.270 jiwa terdampak, 22.860 jiwa mengungsi, dan 1 korban jiwa meninggal. Selain itu, banjir berdampak pada terendahnya 38 sarana ibadah dan 64 sarana pendidikan. Sawah seluas 2.965 hektare juga terendam banjir sehingga petani mengalami gagal panen. Selain itu, jalan nasional yang menghubungkan antara Kabupaten Demak dengan Kabupaten Kudus terputus, sehingga hal ini berdampak pada distribusi ekonomi antar wilayah. Banjir fase ini berakhir pada pertengahan bulan Februari 2024.

Pada pekan kedua bulan Maret terjadi perubahan iklim yang menyebabkan hujan ekstrim kembali mengguyur sebagian besar daerah di Jawa Tengah terutama di daerah hulu sungai. Debit air hujan yang turun kala itu lebih dari 1300 m³, sedangkan daya tampung Sungai Wulan hanya berkisar 800 m³. ketidakseimbangan ini menyebabkan meluapnya air sungai dan jebolnya kembali tanggul-tanggul sungai, termasuk di titik yang sama yang sebelumnya telah diperbaiki pasca banjir

bulan Februari. Total terdapat enam titik tanggul yang jebol pada banjir fase kedua ini. Berikut adalah daftar tanggul yang mengalami kerusakan:

Tabel 1. 6 Daftar Tanggul Jebol Akibat Banjir Demak Maret 2024

No	Nama Tanggul	Kecamatan
1	Tanggul Sungai Wulan	Karanganyar
2	Tanggul Klambu	Karanganyar
3	Tanggul Sungai Dombo	Mranggen
4	Tanggul Sungai Dukuh Luwuk	Dempet
5	Tanggul Sungai Dukuh Menawan	Dempet
6	Tanggul Sungai Jeratun	Gajah

Sumber: Instagram BPBD Kabupaten Demak, 2024

Titik tanggul sungai jebol paling banyak berada di Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Dempet, sehingga kedua kecamatan inilah yang terkena dampak paling besar dibandingkan kecamatan yang lain.

Banjir kali ini lebih meluas dan merusak dibandingkan banjir pada fase pertama. Air dari daerah aliran sungai (DAS) Jragung–Tuntang meluap hingga ke pemukiman warga. Sebanyak 12 dari 14 kecamatan di Kabupaten Demak terdampak banjir, menjadikannya sebagai banjir terparah dalam 30 tahun terakhir. Kerugian yang ditimbulkan pun diperkirakan jauh lebih besar dibanding fase sebelumnya, sebagaimana tergambar dalam infografis berikut.



Gambar 1. 2 Infografis Bencana Banjir Kabupaten Demak per 30 Maret 2024

Sumber: Postingan Instagram BPBD Kabupaten Demak, 2024

Berdasarkan gambar di atas disajikan dampak bencana banjir per 30 Maret 2024 yang merendam 13 Kecamatan, 126 desa, 529 hektar tambak, 3 pasar, 230 tempat ibadah, 9.442 hektar sawah, 15 sarana kantor, 143 fasilitas pendidikan, dan 15 sarana kesehatan. Total kerugian akibat banjir di Kabupaten Demak ditaksir mencapai Rp. 117 Miliar.

BPBD Kabupaten Demak merespon bencana banjir ini bersama Pemerintah Kabupaten Demak membentuk posko terpadu dan menggelar rapat koordinasi harian yang melibatkan BNPB, TNI, Polri, BBWS, PMI, dan relawan. Langkah penanganan yang dilakukan meliputi evakuasi warga terdampak, pendistribusian logistik, penyediaan layanan kesehatan di posko pengungsian, serta pompanisasi untuk mengurangi genangan di wilayah seperti Kalisari, Sayung, dan Loireng. Selain itu, BPBD juga memetakan titik rawan banjir dan menyalurkan peralatan darurat seperti karung pasir, tanah uruk, dan bambu untuk memperkuat tanggul yang rentan jebol.

Rentetan bencana banjir yang terjadi secara beruntun pada bulan Februari dan Maret 2024 seharusnya menjadi peringatan keras bagi Pemerintah Kabupaten Demak untuk segera memperkuat sistem mitigasi bencana, baik dari sisi infrastruktur, pengelolaan lingkungan, maupun kesiapsiagaan masyarakat. Namun sayangnya, upaya penanggulangan yang dilakukan tampaknya belum menyentuh akar persoalan. Hal ini terbukti dengan terjadinya kembali bencana banjir di tahun 2025, meskipun dalam skala yang lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Banjir tahun 2025 dipicu oleh kombinasi antara curah hujan tinggi dan fenomena rob yang menyebabkan air laut naik dan menggenangi wilayah pesisir.

Sejalan dengan pentingnya peran BPBD, regulasi nasional juga telah mengatur pembentukan dan kewenangan lembaga ini secara khusus. Pasal 18 dan pasal 25 Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana memuat aturan untuk mendirikan sebuah organisasi pengendalian bencana di setiap daerah atau biasa disebut dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah pasal 2 ayat 2 menjelaskan bahwa pengesahan BPBD dilakukan melalui peraturan daerah.

Merujuk ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Demak menetapkan dasar hukum pembentukan BPBD Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak. Sebagaimana disebut dalam Pasal 3 bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah ialah elemen eksekutor pemerintah Kabupaten Demak pada aspek pengendalian bencana yang berkedudukan di bawah dan berkewajiban kepada Bupati. Dengan demikian, BPBD sebagai *leading sector* pada penanggulangan bencana daerah yang memiliki peran strategis terkait mitigasi, kesiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi pasca bencana.

Fakta bahwa banjir masih terus berulang dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa persoalan banjir di Kabupaten Demak bukan sekadar akibat cuaca ekstrem, melainkan cerminan dari lemahnya sistem manajemen risiko dan belum optimalnya peran lembaga penanggulangan bencana daerah dalam melakukan mitigasi jangka panjang. Perubahan iklim yang memicu intensitas hujan ekstrem seharusnya

menjadi alarm bagi Pemerintah Daerah untuk memperkuat strategi mitigasi bencana secara menyeluruh. Namun kenyataannya, perhatian terhadap aspek teknis dan sosial dalam pengurangan risiko bencana masih minim. Kurangnya pengelolaan terhadap daerah aliran sungai (DAS), baik dari sisi kedalaman maupun kekuatan tanggul, telah menyebabkan sedimentasi dan pendangkalan di beberapa titik bengawan. Alhasil sungai tidak kapabel dalam memuat volume air yang tinggi, sehingga kerap menyebabkan jebolnya tanggul saat terjadi hujan lebat. Di sisi lain, kurangnya keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga DAS serta lemahnya sistem yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memperburuk kondisi ini, memperbesar potensi kerugian setiap kali bencana

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sriyono et al., 2024) ditemukan bahwa tingkat kapasitas daerah Kabupaten Demak dalam penanggulangan bencana banjir disajikan dalam matriks yang dibagi menjadi 3 kelas, yaitu daerah berkapasitas rendah, sedang, dan tinggi

Tabel 1. 7 Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Demak

No.	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Kapasitas Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
1.	Perkuatan Kebijakan Dan Kelembagaan	0,73	0,61	Sedang
2.	Pengkajian Risiko Dan Perencanaan Terpadu	0,47		
3.	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat Dan Logistik	0,68		
4.	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,58		
5.	Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana	0,76		
6.	Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana	0,53		
7.	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,55		

Sumber: Sriyono et al., (2024)

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Kapasitas Lokal di Kabupaten Demak, diperoleh nilai sebesar 0,61, yang menunjukkan bahwa kemampuan manajemen penanggulangan bencana berada pada kategori sedang. Namun demikian, pada aspek prioritas pengkajian risiko dan perencanaan terpadu memiliki indeks terendah dari ketujuh prioritas tersebut dan berada di bawah indeks kapasitas daerah. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Rommiyati *et al*, (2024) pada penelitiannya bahwa penanganan terhadap risiko bencana belum dilakukan secara optimal karena kurangnya kapasitas penanganan bencana dan kurangnya perhatian pada pengurangan risiko bencana.

Berbagai permasalahan yang muncul dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Demak menunjukkan bahwa efektivitas peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) masih menghadapi tantangan di lapangan. Temuan Dewi *et al.*, (2025) mengungkapkan adanya kedatangan sukarelawan secara spontan tanpa penugasan yang terstruktur, koordinasi yang terfragmentasi antar pemangku kepentingan lokal, serta keterbatasan penilaian kebutuhan secara real-time. Kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya fungsi BPBD sebagai *leading sector* dalam mengoordinasikan seluruh sumber daya penanggulangan bencana, khususnya pada fase tanggap darurat.

Permasalahan koordinasi terlihat secara nyata pada fase kedua penyediaan air bersih dan sanitasi, di mana hubungan kerja antara pemerintah kecamatan dan pemerintah desa belum berjalan secara sinergis. Lemahnya koordinasi ini, sebagaimana dicatat oleh PMI Demak (2024), berpotensi menyebabkan ketidaktepatan sasaran dan keterlambatan distribusi bantuan. Dalam konteks

efektivitas organisasi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi, pengendalian, dan komunikasi yang seharusnya difasilitasi oleh BPBD belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Selain itu, kendala logistik berupa akses terbatas ke wilayah tergenang, keterbatasan sarana transportasi, serta kurangnya jaminan keamanan bagi relawan semakin menghambat pelaksanaan tugas kebencanaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Mujib et al., 2025) ditemukan adanya hambatan utama pada fase awal tanggap darurat meliputi keterbatasan logistik, distribusi bantuan yang belum merata, serta kondisi fasilitas pengungsian yang kurang memadai bagi kelompok rentan. Pada fase pemulihan, BPBD menggunakan pompa air untuk membantu mengurangi genangan, tetapi belum menjadi solusi jangka panjang. Masalah utama masih terletak pada kondisi tanggul dan drainase yang perlu perbaikan permanen. Ketergantungan terhadap pompa tanpa disertai perbaikan tanggul dan normalisasi sungai hanya memberikan solusi sesaat yang tidak menyentuh akar permasalahan. Menurutnya efektivitas mitigasi nonstruktural akan meningkat apabila disertai penguatan kapasitas kelembagaan, pelatihan masyarakat, dan peningkatan kesiapsiagaan di tingkat desa.

Secara ideal, BPBD sebagai organisasi publik dituntut untuk bekerja secara efektif dalam menghadapi situasi krisis yang kompleks. Menurut Richard M. Steers (1985), efektivitas organisasi dapat dilihat melalui tiga dimensi utama, yaitu optimisasi tujuan, perspektif sistem, dan tekanan pada perilaku. Dimensi optimisasi tujuan menekankan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan sesuai dengan sumber daya yang ada. Perspektif sistem memandang organisasi

sebagai bagian dari sistem yang saling terkait, sehingga efektivitas dipengaruhi oleh koordinasi dan keterpaduan antar subsistem. Sementara itu, tekanan pada perilaku berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam mengelola perilaku individu dan kelompok agar selaras dengan tujuan organisasi.

Berdasarkan kerangka tersebut, kondisi penanggulangan banjir di Kabupaten Demak menunjukkan adanya kesenjangan antara peran ideal BPBD sebagai koordinator utama penanggulangan bencana dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Banjir yang terus berulang, berbagai kendala koordinasi, serta keterbatasan mitigasi jangka panjang mengindikasikan bahwa efektivitas BPBD dalam penanggulangan banjir masih perlu dikaji secara lebih mendalam.

Adapun pertanyaan pada studi ini adalah mengapa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak belum optimal dalam mengelola bencana banjir? Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis sadar perlu untuk melangsungkan kajian berkaitan efektivitas peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Demak dalam upaya penanggulangan bencana banjir.

1.2 Identifikasi Masalah

Akan halnya identifikasi masalah ditemukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Demak termasuk daerah dengan risiko banjir tinggi, terbukti dari indeks risiko bencana dan Kajian Risiko Bencana Jawa Tengah 2023 yang menempatkan Demak pada kategori bahaya banjir tinggi dengan luas 53.960 Ha.

2. Rendahnya skor pada aspek pengkajian risiko dan perencanaan terpadu menunjukkan bahwa upaya identifikasi, analisis, dan integrasi risiko banjir ke dalam perencanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Demak belum dilakukan secara optimal.
3. Kondisi geografis dan lingkungan yang rentan, seperti topografi dataran rendah, keberadaan banyak sungai aluvial, sedimentasi, intrusi air laut, penurunan muka tanah, serta adanya 29 titik tanggul sungai dalam kondisi kritis, meningkatkan kompleksitas penanggulangan banjir di Kabupaten Demak.
4. Koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan banjir belum sepenuhnya optimal, sebagaimana ditunjukkan oleh temuan adanya koordinasi yang terfragmentasi antara BPBD, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, PMI, dan relawan, khususnya pada fase tanggap darurat dan penyediaan air bersih serta sanitasi.

1.3 Perumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas BPBD Kabupaten Demak dalam penanggulangan bencana banjir ?
2. Bagaimana faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas BPBD Kabupaten Demak dalam menanggulangi bencana banjir?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis efektivitas BPBD Kabupaten Demak dalam penanggulangan bencana banjir.

2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas BPBD Kabupaten Demak dalam menanggulangi bencana banjir.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berikut ini adalah beberapa kegunaan akademis dan pragmatis yang diharapkan dapat diperoleh dari studi ini:

1. Kegunaan secara akademis
 - a. Output dari studi ini diharapkan bisa mengembangkan informasi dan pemahaman ilmiah di bidang studi Administrasi Publik terkhusus terkait efektivitas organisasi dalam penanggulangan bencana.
 - b. Studi ini bisa menyumbang kontribusi untuk pengembangan teori efektivitas organisasi pada konteks kebencanaan, sehingga dapat berfungsi sebagai basis pada studi berikutnya yang bersangkutan dengan pengelolaan organisasi publik dalam menghadapi bencana.
2. Kegunaan secara Aplikatif
 - a. Temuan studi ini diharapkan dapat berfaedah, utamanya bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak.
 - b. Temuan studi ini diharapkan bisa menyediakan penerangan baru bagi para praktisi di bidang administrasi publik.

1.6 Kajian Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Studi sebelumnya merujuk pada riset yang sudah dilakukan oleh para peneliti sebelum penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian terdahulu ini

memiliki relevansi yang tinggi dengan topik yang sedang diteliti dan sering digunakan sebagai referensi atau pedoman untuk memperdalam pemahaman mengenai fenomena atau konsep yang sedang diinvestigasi. Riset sebelumnya berperan sebagai landasan untuk menganalisis teori, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, serta melacak evolusi pengetahuan dalam area spesifik. Dengan menyelidiki penelitian sebelumnya, peneliti dapat memperoleh perspektif, metodologi, atau hasil yang dapat mendukung dalam merumuskan permasalahan penelitian, merencanakan metodologi, dan menginterpretasi hasilnya. Karena itu, riset sebelumnya memiliki peran krusial dalam mengembangkan pemahaman dan penelitian lebih lanjut dalam berbagai bidang studi. Terdapat beberapa studi terdahulu yang relevan dengan topik yang hendak dieksplorasi, diantaranya:

Tabel 1. 8 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun Jurnal	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	(Fatima & Sudibyo, 2023)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas BPBD Kabupaten Magelang dalam mitigasi erupsi Gunung Merapi dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya.	Penelitian ini menggunakan teori efektivitas organisasi Duncan dan teori faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi menurut Richard M. Steers	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan BPBD Kabupaten Magelang telah berjalan efektif meskipun masih memerlukan peningkatan. Efektivitas organisasi dipengaruhi faktor pendorong berupa pembagian wewenang, motivasi, peningkatan kualitas pegawai, serta penerapan SOP, dan faktor penghambat berupa keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mitigasi bencana.	Lokus penelitian yang dilakukan oleh (Fatima & Sudibyo, 2023) berada di Kabupaten Magelang, berfokus pada fase mitigasi dan jenis bencana gempa bumi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji efektivitas BPBD pada penanggulangan banjir di Kabupaten Demak secara menyeluruh.

2.	(Siregar & Ginting, 2023)	Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program kerja BPBD Kecamatan Batang Lubu Sutam dalam penanggulangan pra-bencana banjir, dengan fokus pada bagaimana upaya tersebut diimplementasikan di lapangan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilannya.	Teori efektivitas menurut Ricard M. Steers	Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dan aparat pemerintah tentang risiko bencana. Hal ini diperburuk oleh perilaku merusak lingkungan, seperti penebangan pohon dan penyempitan sungai, yang meningkatkan kerentanan wilayah.	Penelitian oleh Siregar & Ginting (2023) berfokus pada efektivitas penanggulangan pra-bencana banjir, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mencakup seluruh tahapan penanggulangan banjir.
3.	(Wicaksono & Sibuea, 2022)	Untuk mengetahui efektivitas program Satuan Pendidikan Aman Bencana khususnya di SMA Negeri 1 Cangkringan.	Teori efektivitas menurut Makmur, yang terdiri beberapa indikator, seperti di bawah ini: 1) Ketepatan dalam penentuan waktu 2) Ketepatan dalam perhitungan biaya 3) Ketepatan dalam pengukuran 4) Ketepatan dalam menentukan pilihan	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas program Satuan Pendidikan Aman Bencana di SMA Negeri 1 Cangkringan masih rendah. Meskipun tujuannya adalah melatih semua siswa menjadi tangguh bencana, pelaksanaannya belum mencakup seluruh	Penelitian oleh Wicaksono & Sibuea (2022) berfokus pada efektivitas program pendidikan aman bencana di sekolah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada

			5) Ketepatan dalam berpikir 6) Ketepatan dalam melakukan perintah 7) Ketepatan dalam menentukan tujuan 8) Ketepatan dalam menentukan sasaran		siswa. Hambatan utama program ini adalah kurangnya keberlanjutan dan implementasi yang rutin, yang hanya sebatas pemberian materi tanpa tindak lanjut. Oleh karena itu, disarankan agar program dijalankan dengan perencanaan yang lebih berkelanjutan untuk mengatasi hambatan tersebut.	efektivitas organisasi BPBD.
4.	(Kurniawan et al., 2023)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kerja badan penanggulangan bencana dan untuk mengetahui beban atau cost program kerja BPBD di masyarakat.		Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis normatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan respon dan ketanggapan terhadap bencana. Namun, dalam hal efektivitas kinerjanya,	Penelitian oleh Kurniawan et al. (2023) berfokus pada beban atau cost program BPBD di masyarakat, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada efektivitas

					program kinerja BPBD memiliki beberapa beban atau cost di masyarakat, seperti kurangnya pendidikan dan sosialisasi tentang bencana alam, prosedur pengaduan terhadap bencana alam yang panjang, dan respon yang lambat dalam mengelola bencana alam.	penanggulangan banjir.
5.	(Tripasca et al., 2022)	Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran deskriptif tentang efektivitas dan efisiensi kinerja BPBD Provinsi dalam pengurangan risiko bencana di Sulawesi Tenggara	teori efektifitas organisasi menurut Richard M. Steers	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara sudah efektif. Hal ini didukung oleh kesiapsiagaan badan dalam menghadapi bencana, sumber daya manusia yang kompeten, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Namun,	Penelitian oleh Tripasca et al. (2022) berfokus pada efektivitas BPBD tingkat provinsi dalam pengurangan risiko bencana, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada BPBD tingkat kabupaten.

					efektivitas ini masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain dari sisi kelembagaan, kondisi lingkungan, serta kebijakan dan praktik pengelolaan. Faktor-faktor ini perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan BPBD secara keseluruhan.	
6.	(Salsabila & Alhadi, 2022)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Program Kelurahan Tangguh Bencana oleh BPBD Kota Padang	teori efektivitas menurut Budiani dalam Khadafi dan Mutiarin (2017)	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif.	Penelitian menunjukkan bahwa Program Kelurahan Tangguh Bencana yang dijalankan oleh BPBD Kota Padang sudah tepat sasaran di Kelurahan Olo. Namun, efektivitasnya belum maksimal karena sosialisasi yang kurang dan masih ada faktor-faktor lain yang memengaruhinya.	Penelitian oleh Salsabila & Alhadi (2022) berfokus pada efektivitas Program Kelurahan Tangguh Bencana, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada efektivitas BPBD secara keseluruhan.

7.	(Erna et al., 2024)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana dan Upaya dalam Menginventarisasi dan Identifikasi Kerusakan/Kerugian Pasca Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pali.		Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana di BPBD Kabupaten PALI belum efektif. Masalah utamanya adalah kurangnya integrasi program dan koordinasi dengan masyarakat. Selain itu, sarana seperti Pusdalops PB (Pusat Pengendalian dan Operasional Penanggulangan Bencana) belum berfungsi optimal. Hal ini menghambat sistem peringatan dini dan integrasi data. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan evaluasi rutin, keterlibatan aktif masyarakat, dan pendataan berkala untuk meningkatkan	Penelitian oleh Erna et al. (2024) berfokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada penanggulangan banjir secara menyeluruh.
----	---------------------	---	--	--	--	---

					efektivitas program secara keseluruhan.	
8.	(Sagay & Pangemanan, 2023)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas sistem peringatan dini untuk mitigasi bencana banjir di Kota Manado dan kendala yang dihadapi Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Manado dalam meningkatkan Efektivitas Sistem Peringatan Dini untuk Mitigasi Bencana Banjir di Kota Manado.	Teori pengukuran efektivitas dari James L. Gibson (2005), yaitu: 1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, 2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, 3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, 4. Perencanaan yang matang, 5. Penyusunan program yang tepat, 6. Tersedianya sarana dan prasarana, 7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, 8. Sistem pengawasan dan pengendalian.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.	Penelitian menyimpulkan bahwa tujuan mitigasi bencana oleh BPBD Kota Manado telah tercapai. Buktinya, mereka berhasil memasang Sistem Peringatan Dini khusus banjir di tujuh titik rawan di kota, yaitu Kelurahan Ternate Tanjung, Kelurahan Tanjung Batu, Kelurahan Batu Kota, Kelurahan Dendengan Dalam, Kelurahan Bailang, Kelurahan Pakowa, dan Kelurahan Paal Dua.	Penelitian oleh Sagay & Pangemanan (2023) berfokus pada efektivitas sistem peringatan dini banjir, selain itu teori yang digunakan yaitu pengukuran efektivitas menurut Gibson (2005) sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada efektivitas organisasi BPBD dan menggunakan teori efektivitas organisasi menurut

						Richard M Steers..
9.	(Silalahi & Trimurni, 2024)	Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas kebijakan penanggulangan banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kecamatan Medan Petisah	Teori yang digunakan yaitu teori tiga tepat menurut Riant Nugrho (2012) yaitu: 1. Tepat Kebijakan 2. Tepat Pelaksanaan 3. Tepat target.	Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan banjir oleh BPBD Kota Medan sudah efektif dari sisi kebijakan dan eksekusi. Kebijakan yang ada sudah mengedepankan solusi, dan pelaksanaannya melibatkan kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Namun, program ini belum sepenuhnya berhasil mencapai target karena rendahnya kesadaran masyarakat akan keselamatan dan kurangnya partisipasi. Masyarakat cenderung masih memprioritaskan kepentingan pribadi di	Penelitian oleh Silalahi & Trimurni (2024) menggunakan teori tiga tepat kebijakan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori efektivitas organisasi Richard M. Steers.

					atas kepentingan bersama.	
10.	(Suryani, 2021)	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektifitas pelaksanaan kegiatan pemulihan dan peningkatan fisik pascabencana dan identifikasi kendala dan permasalahan yang dihadapi.	Pengujian menggunakan standar 5T yang ditetapkan oleh BNPB, yaitu: 1. tepat perencanaan, 2. tepat administrasi, 3. tepat penyerapan anggaran, 4. tepat spesifik teknis dan 5. tepat waktu.	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan program RTG Tahap I tidak memenuhi standar, sedangkan pelaksanaan RTG Tahap II dianggap sangat efektif karena memenuhi lima standar (perencanaan, administrasi, penyerapan anggaran, spesifikasi teknis, dan waktu). Keberhasilan Tahap II ini disebabkan oleh pelaksanaannya dalam kondisi tidak tanggap darurat dan skala yang kecil, sehingga setiap kabupaten/kota dapat melaksanakannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.	Penelitian oleh Suryani (2021) berfokus pada efektivitas program pemulihan fisik pascabencana, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada penanggulangan banjir dari seluruh fase.

11.	(Amriampa, 2023)	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas program penanggulangan bencana alam berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Utara	Penelitian ini menggunakan teori efektivitas organisasi menurut Richard M. Steers	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa program penanggulangan bencana alam Provinsi Kalimantan Utara telah berjalan efektif pada dimensi pencapaian tujuan, dimana anggaran yang dialokasikan sesuai dengan realisasi yang ada. Sedangkan untuk integrasi dalam pelaksanaan program, belum terjalin dengan baik karena kurangnya latihan penanggulangan bencana yang serta Perspektif Sistem dalam pelaksanaan yang sulit dilakukan karena kondisi topografi yang masih sulit dijangkau.	Penelitian oleh Amriampa (2023) menyimpulkan program penanggulangan bencana berjalan efektif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menemukan bahwa efektivitas penanggulangan banjir belum optimal.
-----	------------------	--	---	--	---	---

12.	(Aldilansyah et al., 2023)	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas penanganan pasca bencana alam di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima		Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.	Hasil dari penelitian ini yaitu pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi fokus utama dalam membangun ketangguhan masyarakat. Peningkatan kesadaran, keterampilan, dan kolaborasi antar lembaga menjadi kunci keberhasilan dalam meminimalisir risiko dan mengurangi dampak bencana. Dengan memperkuat sistem penanggulangan pascabencana, Kota Bima dapat menghadapi masa depan yang lebih tangguh, tanggap, dan mampu menjaga	Penelitian oleh Aldilansyah et al. (2023) berfokus pada penanganan pascabencana, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada seluruh siklus penanggulangan banjir.
-----	----------------------------	--	--	---	--	---

					keamanan dan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan terus meningkatkan pemahaman dan menerapkan strategi yang efektif, Kota Bima berpotensi menjadi contoh dalam membangun kota yang aman dan tangguh terhadap ancaman bencana alam.	
13.	(Samuel, 2024)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan penanggulangan bencana dalam mengurangi dampak bencana alam.		Penelitian ini menggunakan metodologi studi pustaka	Efektivitas kebijakan penanggulangan bencana dalam mengurangi dampak bencana alam sangat bergantung pada faktor: sistem peringatan dini, kesiapsiagaan Masyarakat, katahanan infrastruktur, dan Upaya tanggap darurat yang terkoordinasi.	Penelitian oleh Samuel (2024) menggunakan metode studi pustaka, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan data lapangan

14.	(Paramita et al., 2023)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Desa Tangguh Bencana di Desa Citepus Kecamatan Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi.		Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif	Program Desa Tangguh Bencana di Desa Citepus, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi pada tahun 2023 dinilai memiliki tingkat efektivitas yang tinggi. Meskipun wilayah ini memiliki risiko bencana yang besar, berbagai upaya dari pemerintah, BPBD, dan masyarakat berhasil meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana. Faktor utama keberhasilan program ini meliputi ketersediaan sarana dan prasarana, standar operasional prosedur yang baik, serta kompetensi pegawai. Meski masih ada tantangan, seperti rendahnya kapasitas	Penelitian oleh Paramita et al. (2023) menggunakan pendekatan kuantitatif pada Desa Tangguh Bencana, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif pada BPBD.
-----	-------------------------	---	--	---	---	--

					masyarakat, program ini tetap memberikan dampak positif dengan meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana.	
15.	(Forayo et al., 2023)	Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kesiapsiagaan, tingkat efektivitas, dan masalah yang dihadapi oleh Dewan Manajemen dan Pengurangan Risiko Bencana Kota (City Disaster Risk Reduction and Management Council/CDRMC) Kota Dagupan		Penelitian ini dilakukan melalui metode deskriptif-evaluatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa CDRMC Kota Dagupan cukup siap dan cukup efektif. Meskipun demikian, CDRMC menghadapi beberapa masalah yang cukup serius seperti terbatasnya jumlah personil personil, kurangnya pelatihan personil yang mengakibatkan kesulitan dalam pelaksanaan beberapa fungsi dan kesulitan dalam melibatkan masyarakat dalam	Penelitian oleh Forayo et al. (2023) dilakukan di luar negeri, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berlokasi di Kabupaten Demak, Indonesia.

					perancangan dan pengelolaan proyek. Hal ini menunjukkan bahwa CDRRMC tidak memiliki persiapan yang cukup untuk beberapa program dan program-program tersebut tidak dilaksanakan karena beberapa warga tidak mengetahui adanya program tersebut	
16.	(Kalogiannidis et al., 2024)	Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektifitas mekanisme perlindungan sipil dalam operasi manajemen darurat yang efektif di organisasi publik berdasarkan perspektif Eropa.		Metode penelitian kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peringatan dini dan peramalan risiko bencana berpengaruh positif terhadap manajemen darurat di organisasi publik. Uni Eropa berupaya meningkatkan koordinasi perlindungan sipil, namun tantangan seperti perbedaan sistem pertahanan sipil	Penelitian oleh Kalogiannidis et al. (2024) menggunakan perspektif Eropa dan pendekatan makro, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan perspektif lokal tingkat daerah.

					dan kurangnya kepercayaan antar organisasi masih ada. Krisis global seperti pengungsi, terorisme, dan bencana alam mempertegas perlunya peningkatan sistem peringatan dini, ahli perlindungan sipil, dan perencanaan bencana untuk manajemen darurat yang lebih efektif.	
17.	(Alhadi et al., 2021)	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami efektivitas program (papa sadar call center112) dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Padang Pariaman	Teori efektivitas program menurut Budiani, Dimana indikatornya terdiri atas: 1. ketepatan rekomendasi program, 2. sosialisasi program, 3. tujuan program, dan 4. monitoring.	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif	Efektivitas Program Papa Sadar Bana Call Center 112 dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan, penulis menyimpulkan bahwa efektivitas program ini belum efektif karena masih banyak kekurangan dari program Call	Penelitian oleh Alhadi et al. (2021) berfokus pada satu program layanan kebencanaan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada kinerja BPBD secara menyeluruh.

					Center Papa Sadar Bana 112 baik dari segi internal maupun eksternal. Semua itu dapat dilihat dari pemahaman indikator-indikator dalam teori Budiani yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan monitoring.	
18.	(Nurany et al., 2024)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelatihan mitigasi bencana kebakaran Kota Surabaya, faktor penghambat dan pendukung dalam pelatihan mitigasi bencana kebakaran dan upaya yang dilakukan BPBD Kota Surabaya dalam mengatasi hambatan dalam	Teori efektivitas menurut Sutrisno, Adapun indikatornya yaitu: 1. Produksi 2. Efisiensi 3. Kepuasan 4. Perspektif Sistem 5. Pembangunan	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelatihan mitigasi bencana kebakaran di BPBD Kota Surabaya dikategorikan cukup efektif. Penelitian ini menunjukkan kesadaran masyarakat yang tinggi, kepuasan peserta, dan Perspektif Sistem pelatih terhadap pelatihan mitigasi bencana	Penelitian oleh Nurany et al. (2024) berfokus pada mitigasi bencana kebakaran, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada mitigasi dan penanggulangan banjir

		pelatihan mitigasi bencana kebakaran.			kebakaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas meliputi sarana, prasarana, kompetensi pegawai, SOP, dan partisipasi masyarakat. BPBD Kota Surabaya berupaya meningkatkan efektivitas melalui sertifikasi kompetensi, pembinaan, pendampingan, dan kolaborasi dengan instansi lain.	
19.	(Achmad, 2023)	Tujuan penelitian ini untuk menilai efektivitas kebijakan penanganan gempa bumi di Indonesia.		Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian ini yaitu kebijakan penanggulangan bencana seismik Indonesia telah dirumuskan secara komprehensif melalui UU No. 24 Tahun 2007 dan peraturan turunannya, serta pelaksanaannya dinilai	Penelitian oleh Achmad (2023) berfokus pada kebijakan penanganan gempa bumi tingkat nasional, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada

					cukup efektif. Keberhasilan ini didukung oleh komunikasi yang baik, ketersediaan sumber daya, serta struktur birokrasi yang mendukung, meskipun masih ada tantangan dalam informasi, infrastruktur, anggaran, dan koordinasi. Untuk meningkatkan efektivitas, pemerintah perlu memperkuat akses informasi, infrastruktur, dan sumber daya penanggulangan bencana gempa bumi.	implementasi kebijakan banjir di tingkat daerah.
20.	(Santos, 2020)	Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas penanggulangan bencana berbasis masyarakat.	Teori yang digunakan yaitu teori efektivitas manajemen bencana berbasis masyarakat yang diikut melalui	Jenis penelitian ini yaitu kuantitatif dengan metode deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyampaian peringatan dini terbukti efektif dalam meningkatkan	Penelitian oleh Santos (2020) berfokus pada penanggulangan bencana berbasis

			beberapa indikator diantaranya: 1. penyampaian peringatan dini, 2. pencegahan dan meminimalkan dampak bencana alam, dan, 3. melakukan periode pemulihan jangka pendek.		kewaspadaan penduduk. Pencegahan dan mitigasi bencana telah dipersiapkan dengan baik, serta tindakan yang diperlukan telah dilakukan dengan benar. Dalam pemulihan jangka pendek, bantuan yang cukup tersedia, memungkinkan korban pulih lebih cepat dan tim penyelamat bekerja tanpa hambatan.	masyarakat, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada efektivitas organisasi BPBD dengan keterlibatan masyarakat.
--	--	--	---	--	--	---

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Studi yang akan diteliti dengan judul Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Demak menggunakan acuan beberapa karya ilmiah berupa artikel jurnal terdahulu yang relevan dengan topik penelitian peneliti. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada lokasi penelitian, objek penelitian, teori yang digunakan, dan metode yang diterapkan. Sebagian penelitian terdahulu menggunakan teori Budiani, Sutrisno, Riant Nugroho, dan beberapa teori lainnya, sedangkan peneliti menggunakan teori efektivitas organisasi menurut Richard M. Steers (1985) yang terdiri dari tiga dimensi yaitu optimisasi tujuan, perspektif sistem, serta tekanan pada perilaku.

1.6.2 Administrasi Publik

Ilmu administrasi negara di abad ke-21 semakin kompleks dan dinamis, sehingga disiplin ilmu yang ada sudah dianggap terbatas serta tidak lagi cukup memadai untuk mengakomodasi. Administrasi publik muncul karena terjadi evolusi konsep ilmu administrasi negara, di mana pergeseran fokus dari negara selaku wakil satu-satunya dengan wewenang dalam melaksanakan kebijakan publik, peran negara beralih menjadi penyedia bagi masyarakat. (Utomo dalam Nur *et al.*, 2022)

Administrasi publik merupakan ilmu sosial yang mengeksplorasi lembaga-lembaga yang berkaitan dengan cabang legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta isu-isu publik seperti kebijakan publik, manajemen publik,

administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika administrasi (Panjaitan & Pardede, 2021).

Administrasi publik, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, merupakan upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan (Ibrahim, 2007) yang dijalankan oleh lembaga pemerintah untuk mendapatkan dukungan dan dana dari masyarakat bagi program pemerintah, serta mengokohkan dan mengubah struktur organisasi (Caiden, 1982).

Pendapat lain mendefinisikan administrasi publik adalah sebuah bentuk kerjasama orang atau lembaga untuk melaksanakan tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik (Pasolong, 2007) seperti melayani publik dan melaksanakan kebijakan (Hughes, 1994) sebagai sebuah proses keseluruhan pencapaian tujuan secara efisien (Robbins, 1983). Sebagai kombinasi teori dan praktik, administrasi bertujuan sebagai promosi pemerintah dalam konteks hubungan Masyarakat dan menstimulasi kebijakan publik supaya lebih responsif (Henry, 1998) melalui koordinasi formulasi sumberdaya personel publik, mengimplementasikan keputusan dan kebijakan publik (Chandler dan Plano, 1988), dan melembagakan praktek manajemen beriringan nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan hajat hidup Masyarakat (Henry, 1988) untuk mencapai segala tujuan-tujuan dari pemerintah (Waldo, 1971).

Menurut Gray (1994) peran administrasi publik bagi masyarakat yakni:

- (1) Menjamin bahwa distribusi pendapat nasional disebar dengan adil bagi seluruh masyarakat, memastikan kesetaraan.
- (2) Melindungi hak milik masyarakat dan memastikan masyarakat memiliki kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap tubuh dan jiwa sendiri, terkhusus dalam hal pendidikan, kesehatan, dan pelayanan kepada kelompok masyarakat yang lanjut usia.
- (3) Memastikan warisan nilai-nilai budaya yang bervariasi dalam masyarakat dipelihara untuk generasi mendatang.
- (4) Memberikan jaminan dan dukungan terhadap nilai-nilai yang berkembang seiring dengan perubahan zaman, serta mempromosikan kehidupan yang harmonis dan damai bersama budaya lain.

Administrasi publik terkonsentrasi menjadi dua, yaitu kebijakan publik dan manajemen publik (WS *et al.*, 2019). Penelitian ini condong ke dalam manajemen publik.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Bidang administrasi publik dianggap mengalami banyak perkembangan dan penyempurnaan seiring dengan tuntutan dan kesulitan saat ini. Perspektif atau sudut pandang yang dapat digunakan untuk membahas berbagai isu dalam subjek ini adalah paradigma administrasi publik. Para ahli umumnya menganggap beberapa paradigma berikut sebagai paradigma yang dapat diperdebatkan:

- 1) Paradigma Satu: *Old Public Administration*

Woodrow Wilson memulai gerakan untuk perubahan yang lebih baik melalui Paradigma OPA. Ia mengusulkan bahwa pemerintahan publik wajib terpisah dari lingkungan politik. Buah pikir tersebut menyatakan bahwa negara telah mengantarkan para penguasa terlalu banyak peluang guna mempertahankan nepotisme dan sistem yang rusak. Oleh karena itu, ia merilis ajaran untuk membedakan lingkungan politik (legislatif) dari lingkungan eksekutif. Dalam ajaran ini administrator bertanggung jawab untuk melaksanakan atau menerapkan kebijakan, sementara legislator adalah pihak yang membuat kebijakan. Gaya birokrasi Wilson sesuai dengan semangat dunia bisnis. Ia mengatakan bahwa pejabat publik harus selalu fokus pada prinsip-prinsip ekonomi dan efisiensi, serta dipilih berdasarkan kemampuan dan kesesuaian mereka, bukan berdasarkan koneksi politik atau jabatan. Wilson berupaya untuk mengaplikasikan dunia bisnis dalam pemerintahan, akan tetapi, konsekuensi timbul signifikan karena prinsip dunia bisnis menurut pendirinya, Taylor harus mengubah metode rule of thumb dimana pekerja wajib diseleksi dan diberi pelatihan, serta dikembangkan secara ilmiah, dan didorong untuk bekerja sama sesuai prinsip-prinsip ilmiah untuk menyelesaikan berbagai tugas pekerjaan. Reputasi Taylor sebagai pencipta dasar manajemen profesional telah diakui secara global. Pada fase paradigma ini ditandai dengan terbitnya buku *Politics and Administration* oleh Frank J. Goodnow dan Leonard D. White mengemukakan bahwa politik dan administrasi adalah dua fungsi utama pemerintah yang berbeda. Buku ini menandai fase ini. Ditambahkan,

Goodnow berpendapat bahwa administrasi publik seharusnya berpusat pada birokrasi pemerintah.

2) Paradigma kedua: *New Public Management*

Fase kedua adalah munculnya *New Public Management* (NPM). Menurut Lynn (2006), paradigma baru ini sering disebut juga sebagai "*managerialism*" yang menekankan pada insentif, persaingan, dan kinerja. NPM adalah pendekatan di mana teknik-teknik manajerial, terutama yang berasal dari praktik terbaik di sektor bisnis, diterapkan dalam organisasi publik untuk meningkatkan nilai ekonomis dalam pelayanan publik. Menurut Osborne dan Gaebler (1996) prinsip *New Public Management* terdiri dari:

- a) Pemerintahan sebagai pembuat kebijakan
- b) Pemerintahan milik masyarakat
- c) Pemerintahan yang kompetitif
- d) Pemerintahan yang digerakkan oleh misi
- e) Pemerintahan yang berorientasi hasil
- f) Pemerintahan berorientasi pelanggan
- g) Pemerintahan wirausaha
- h) Pemerintahan antisipatif
- i) Pemerintahan desentralisasi
- j) Pemerintahan berorientasi pasar

3) Paradigma ketiga: *New Public Service*

Penerapan NPM dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip fundamental administrasi publik, sehingga memunculkan sejumlah kritik dari para pakar terhadap konsep tersebut. Konsep *New Public Service* (NPS) diperkenalkan oleh Denhardt dan Denhardt (2003) dalam buku "*The New Public Service: Serving, not Steering*" untuk merespons paradigma administrasi yang dominan saat ini, yaitu konsep *New Public Management* yang berprinsip pasar sebagai solusi untuk masalah di sektor publik.

Menurut Denhardt & Denhardt, pemerintah seharusnya memberikan layanan publik dengan pendekatan Pelayanan Publik Baru (PPB), yang tidak dilakukan seperti sebuah perusahaan tetapi secara demokratis, adil, merata, tidak diskriminatif, jujur, dan akuntabel. Paradigma ini mengutamakan:

- a) Kepentingan publik sebagai landasan utama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, sebagai bentuk perwujudan nilai-nilai demokrasi.
- b) Nilai-nilai demokrasi ini memberikan energi bagi birokrat/pegawai pemerintah dalam melayani masyarakat secara lebih adil, merata, jujur, dan bertanggung jawab.

Paradigma dan konsep NPS dilandasi oleh nilai dan teori demokrasi dimaksudkan bahwa tugas pemerintah adalah untuk mensejahterakan rakyat dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat, artinya bahwa pemerintah harus merespons kebutuhan dan keinginan warganya.

4) Paradigma keempat: *Good Governance*

Paradigma ini menyoroti bahwa administrasi publik sangat memperhatikan keberadaan pemerintahan yang baik dan amanah. Pemerintahan demokratis yang terstruktur dengan tata kelola pemerintahan yang baik dicirikan oleh kepemimpinan yang efektif, efisien, transparan, dan berwibawa. Tata kelola pemerintahan yang demokratis menyoroti fakta bahwa kekuasaan tidak hanya berada di tangan pemerintah, tetapi bergeser ke pusat rakyat. Jika tiga elemen masyarakat, pemerintah, dan pengusaha. masyarakat bekerja sama dengan baik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan tercapai.

Penelitian ini mengenai efektivitas organisasi masuk ke dalam paradigma *New Public Management* karena pendekatan ini memfokuskan pada penerapan prinsip-prinsip manajemen dari sektor swasta ke dalam sektor publik. NPM mendorong organisasi publik untuk menjadi lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui perencanaan strategis, pengukuran kinerja, dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Fokus penelitian ini adalah efektivitas organisasi BPBD dalam menangani bencana banjir, yang menitikberatkan pada kinerja, efisiensi, dan pencapaian tujuan. NPM menekankan pada tata kelola yang lebih profesional, transparan, dan berbasis hasil, yang sejalan dengan evaluasi efektivitas BPBD. Selain itu, efektivitas organisasi sesuai dengan prinsip NPM menurut Osborne dan Gaebler (1996) utamanya prinsip ke-empat yaitu pemerintahan yang digerakkan oleh misi serta prinsip ke-lima yaitu pemerintahan yang berorientasi pada hasil. BPBD memiliki misi utama dalam mengurangi risiko dan dampak bencana, sehingga efektivitas organisasi diukur dari sejauh mana

BPBD mampu menjalankan penanggulangan bencana secara maksimal. BPBD juga dituntut untuk mencapai hasil nyata dalam penanggulangan banjir, seperti menurunkan frekuensi dan dampak banjir, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, serta mempercepat proses tanggap darurat dan pemulihan pascabencana.

1.6.4 Manajemen Publik

Administrasi publik dibagi menjadi dua bagian: manajemen publik, yang mencakup topik-topik seperti desain program dan restrukturisasi organisasi, alokasi sumber daya dengan menggunakan sistem penganggaran, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, serta evaluasi dan audit program, yang diibaratkan sebagai jantung dan peredaran darah, dan kebijakan publik, yang diibaratkan sebagai otak dan saraf. (Hyde dan Shafritz, 1990).

Lynn (1996) menggambarkan manajemen publik sebagai seni, keilmuan, dan profesi. Manajemen publik sangat fleksibel tergantung pada situasi dan lingkungan karena manajemen publik merupakan seni yang harus dilakukan oleh para praktisi secara kreatif dan tidak dapat dipelajari dengan cara yang "diperhitungkan". Sebagai sebuah ilmu, manajemen publik membutuhkan studi metodis bersama dengan interpretasi dan justifikasi. Namun demikian, ada profesi orang-orang yang berspesialisasi dalam manajemen publik.

Pengelolaan sektor publik oleh institusi publik (pemerintah) disebut sebagai "manajemen publik". Istilah ini mencakup aspek-aspek perencanaan,

pengorganisasian, pengendalian, strategi, dan evaluasi sumber daya manusia, anggaran, sarana & parasana, teknologi, dan sumber daya lainnya yang guna ketercapaian tujuan akhir yang telah dilegalkan. (Satibi, 2023).

Pada tahun 1911, Frederick W. Taylor menetapkan *scientific management* atau manajemen ilmiah, sebagai dasar keilmuan manajemen publik. Prinsip Taylor bergantung pada pengukuran proses kerja, seperti proses seleksi, dan dampak yang ditimbulkannya, yang dapat membantu pekerja bekerja sama lebih baik untuk mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan produktivitas. Luther Gullick kemudian mengubah gagasan Taylor dan menawarkan beberapa prinsip manajemen ilmiah untuk digunakan dalam pemerintah, seperti POSDCORB (*planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting*) (Wijaya dan Danar, 2014).

Dahl dan Lindblom mengakui adanya ketidakjelasan dan tumpang tindih antara manajemen sektor public dan manajemen sektor privat. Setidaknya terdapat 3 hal yang membedakan diantara keduanya menurut Rainey & Han Clum, diantaranya:

- a) Adanya perbedaan elemen lingkungan seperti tekanan politik internal dan tidak adanya orientasi ekonomi.
- b) Karena adanya variasi dalam transaksi organisasi, manajemen di sektor publik berada di bawah tekanan yang kuat untuk memberikan prosedur yang adil, gesit, jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

- c) Variasi dalam bagaimana struktur dan proses organisasi berfungsi termasuk kompleks, lambat, dan tidak inovatif, serta ambiguitas dan konflik yang tinggi dari deskripsi tujuan perusahaan (Wijaya & Danar 2014).

Salah satu bagian dari manajemen publik adalah manajemen bencana. Hal ini dilatarbelakangi karena peran krusial pemerintah dalam melindungi masyarakat, mengelola sumber daya, dan memastikan keberlanjutan pembangunan. Dengan peran sentralnya, pemerintah dapat memastikan bahwa strategi dan kebijakan penanggulangan bencana diterapkan secara efektif, koordinasi lintas sektor terjaga, dan masyarakat dapat pulih dengan cepat dan tangguh setelah bencana.

1.6.5 Efektivitas Organisasi

Efektivitas merupakan konsep yang sering digunakan dalam manajemen dan organisasi untuk menilai sejauh mana suatu individu, kelompok, atau organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Gibson, Ivancevich, dan Donnelly (1997), efektivitas dapat didefinisikan sebagai "tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi dengan penggunaan sumber daya yang tersedia secara optimal." Sementara itu, Stoner, Freeman, dan Gilbert (1995) menyatakan bahwa efektivitas adalah "kemampuan suatu organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan melalui aktivitas yang terencana dan terorganisir dengan baik."

Menurut Robbins dan Coulter (2016), efektivitas lebih menekankan pada "hasil yang diperoleh dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan,

tanpa mempertimbangkan efisiensi penggunaan sumber daya." Dengan demikian, efektivitas menyoroti aspek pencapaian tujuan, sedangkan efisiensi lebih berfokus pada cara atau proses pencapaian tersebut.

Efektivitas organisasi mengacu pada tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Menurut Steers (1985), efektivitas organisasi merupakan "kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara formal melalui berbagai strategi dan pendekatan yang disesuaikan dengan lingkungan eksternal dan internalnya."

Pendapat serupa dikemukakan oleh Daft (2010) yang menyatakan bahwa efektivitas organisasi adalah "kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan yang relevan melalui strategi yang tepat dan koordinasi yang efisien di antara seluruh bagian organisasi." Selain itu, Campbell (1977) menyebutkan bahwa efektivitas organisasi tidak hanya diukur dari pencapaian tujuan, tetapi juga dari adaptasi organisasi terhadap perubahan lingkungan serta kepuasan pemangku kepentingan.

Steers, (1985) menambahkan bahwa efektivitas organisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kepemimpinan, struktur organisasi, budaya kerja, serta interaksi antara organisasi dengan lingkungannya. Dengan demikian, efektivitas organisasi tidak hanya ditentukan oleh faktor internal, tetapi juga oleh bagaimana organisasi mampu menyesuaikan diri dengan dinamika eksternal.

Steers (1985) mengembangkan model pengukuran efektivitas organisasi yang menyoroti beberapa dimensi utama, yaitu:

1) Optimisasi tujuan

Optimisasi tujuan menekankan bahwa setiap organisasi memiliki tujuan berbeda, sehingga keberhasilannya harus diukur dari pencapaian tujuan masing-masing, bukan menurut penilaian dari peneliti. Dimensi ini juga mengakui bahwa organisasi tidak selalu bisa memaksimalkan tujuannya karena adanya keterbatasan, sehingga manajer harus menetapkan tujuan yang optimal sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Optimisasi menjadi cara untuk menyeimbangkan berbagai tujuan yang kemungkinan bertentangan, sehingga masing-masing tujuan mendapat perhatian dan sumber daya sesuai tingkat kepentingannya. Oleh karena itu, efektivitas organisasi seharusnya dinilai berdasarkan tujuan realistis dan dapat dicapai bukan berdasarkan tujuan maksimal.

2) Perspektif sistem

Menurut Etzioni (1975), Georgopoulos dan Tannenbaum (1957), dkk dalam Steers (1985), dimensi perspektif sistem menekankan pentingnya arti interaksi organisasi dengan lingkungan. Perspektif sistem melihat bagaimana hubungan antar komponen di dalam maupun di luar organisasi saling mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan organisasi. Apabila hubungan ini dipahami secara jelas, maka manajer akan lebih mudah mengambil keputusan untuk memperlancar pencapaian tujuan, berkat bertambahnya pemahaman terkait dinamika organisasi.

3) Tekanan pada Perilaku

Tekanan pada perilaku berarti efektivitas organisasi dilihat melalui pemahaman peran perilaku manusia dan bagaimana hal ini mempengaruhi prestasi organisasi. Artinya, untuk menilai efektivitas organisasi kita wajib melihat perilaku para pekerja sebagai unit analisis dasarnya. Apabila tujuan anggota organisasi selaras dengan tujuan organisasi, maka biasanya motivasi kerja mereka lebih tinggi untuk mencapai sasaran tersebut. Sebaliknya, apabila tujuan organisasi tidak sesuai dengan kebutuhan atau keinginan pegawai maka mereka cenderung tidak memberikan usaha maksimal. Oleh karena itu, efektivitas organisasi sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara tujuan pekerja dan tujuan organisasi. Semakin selaras keduanya, semakin besar peluang organisasi mencapai kinerja yang baik.

Adapun faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi dengan menurut Steers, (1985) terdiri dari:

a) Ciri organisasi

Ciri organisasi mencakup struktur dan teknologi organisasi. Struktur organisasi yang baik, seperti pembagian tugas yang jelas, spesialisasi fungsi, serta sistem pengambilan keputusan yang efektif dapat meningkatkan produktivitas organisasi. Sedangkan teknologi juga berpengaruh terhadap efektivitas, namun dampaknya tidak selalu dapat langsung terlihat. Teknologi yang berkembang memungkinkan penggunaan metode dan alat baru yang lebih efisien, sehingga meningkatkan efektivitas organisasi. Teknologi akan memberikan hasil terbaik apabila sesuai dengan

struktur organisasi. Kesesuaian antara struktur dan teknologi akan mempermudah pegawai dalam bekerja.

b) Ciri Lingkungan

Ciri lingkungan meliputi dua aspek yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal mencakup berbagai faktor di luar batas organisasi yang dapat mempengaruhi operasionalnya. Lingkungan ekstern ini dinilai melalui tiga unsur yaitu stabilitas lingkungan, kompleksitas lingkungan, dan derajat ketidakpastian. Sedangkan lingkungan internal atau iklim organisasi mencakup berbagai aspek dalam lingkungan kerja yang memengaruhi kinerja dan budaya organisasi. Atribut lingkungan internal meliputi pekerja sentris dan orientasi pada prestasi.

c) Ciri Pekerja

Faktor ketiga yang memengaruhi efektivitas organisasi adalah para pekerja itu sendiri. Memahami perbedaan pribadi diantara pekerja sangatlah penting, karena setiap pekerja memiliki karakter, kebutuhan, dan cara respon yang berbeda terhadap upaya manajemen. Keragaman ini sering membuat perilaku mereka tidak sama meskipun bekerja dalam lingkungan yang sama. Perbedaan individu tersebut dapat berpengaruh terhadap efektivitas, yakni rasa keterikatan pekerja terhadap organisasi dan prestasi kerja.

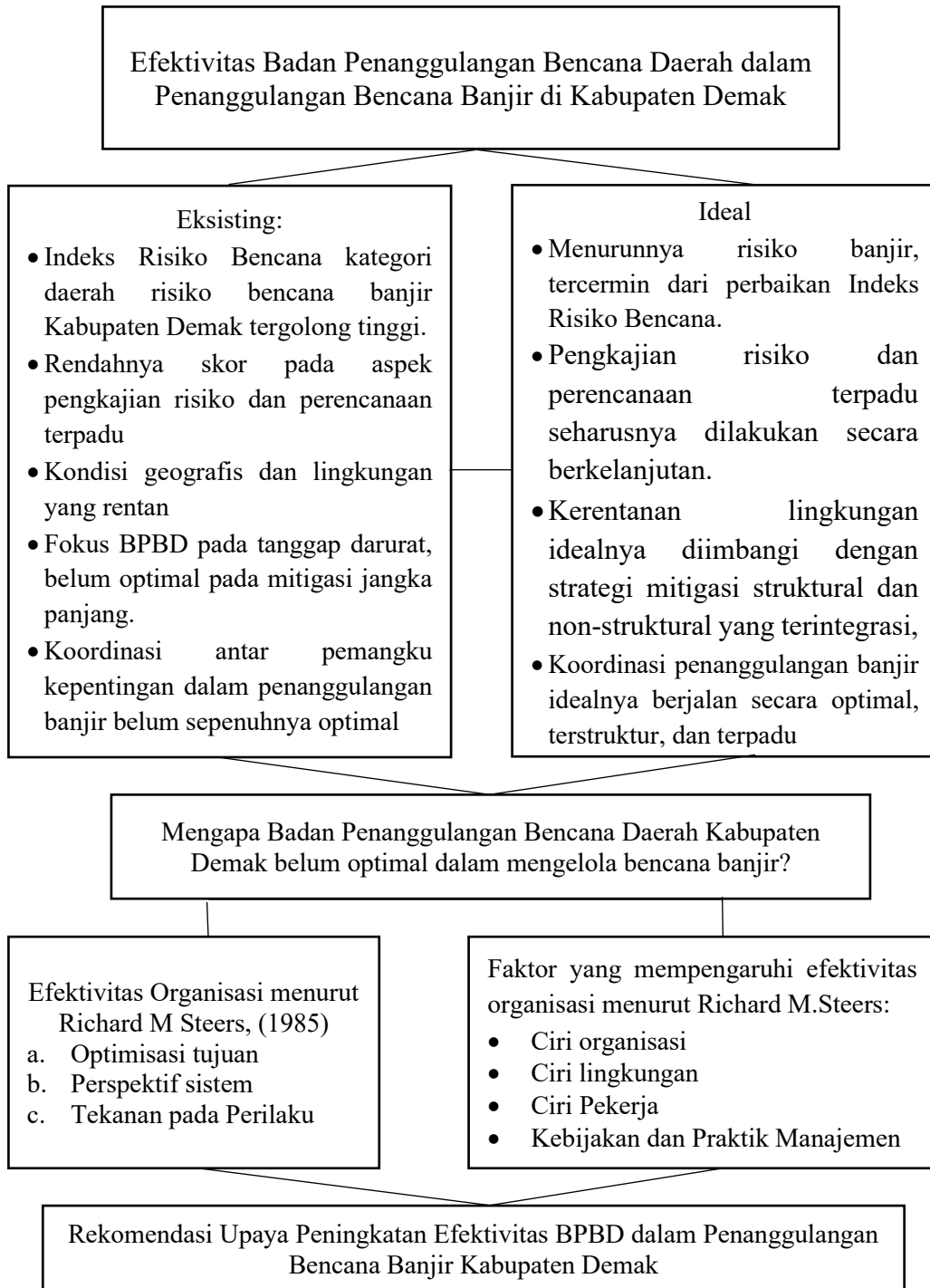
d) Kebijakan dan Praktik Manajemen.

Efektivitas organisasi dapat ditingkatkan melalui penetapan tujuan strategis yang jelas sebagai dasar arah kebijakan, pengelolaan sumberdaya, dan

penerapan pedoman kebijakan yang adil. Praktik manajemen juga mencakup penciptaan lingkungan kerja yang mendukung prestasi melalui seleksi, pelatihan, desain tugas, dan sistem imbalan yang tepat sebagai kebijakan pengembangan sumberdaya manusia. Selain itu, praktik komunikasi harus dibangun secara bertahap agar aliran informasi mendukung pengambilan keputusan. Dalam kepemimpinan, pelibatan pekerja merupakan praktik manajerial yang dapat meningkatkan komitmen terhadap kebijakan, meski tidak selalu sesuai untuk semua situasi. Secara keseluruhan, kebijakan dan praktik manajemen ini bekerja bersama untuk memastikan organisasi berjalan efektif.

Berdasarkan teori efektivitas organisasi tersebut, efektivitas BPBD Kabupaten Demak dalam penanggulangan banjir dapat dimaknai sebagai kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan penanggulangan banjir secara optimal sesuai mandat, sumber daya, dan kondisi lingkungan yang dihadapi. Efektivitas BPBD tercermin dari penetapan tujuan yang realistis dan terprioritas pada setiap fase penanggulangan bencana, kemampuan mengoordinasikan berbagai pemangku kepentingan sebagai satu sistem yang terpadu, serta keselarasan perilaku dan kinerja aparatur dengan tujuan organisasi. Dukungan struktur organisasi, pemanfaatan teknologi kebencanaan yang sesuai, lingkungan kerja yang kondusif, serta kebijakan dan praktik manajemen yang adaptif menjadi faktor penentu agar BPBD mampu merespons kompleksitas banjir di Kabupaten Demak secara efektif.

1.7 Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

1.8 Operasional Konsep

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala Yang diamati
Efektivitas Organisasi adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan fungsi dan perannya, yang ditentukan oleh sejauh mana organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, menjaga komitmen dan kerja sama antaranggota dalam rangka mempertahankan stabilitas internal, serta menyesuaikan diri dengan dinamika dan perubahan lingkungan eksternal maupun internal agar tetap relevan dan berkelanjutan.	Optimisasi Tujuan adalah cara untuk menyeimbangkan berbagai tujuan yang kemungkinan bertentangan, sehingga masing-masing tujuan mendapat perhatian dan sumber daya sesuai tingkat kepentingannya. Oleh karena itu, efektivitas organisasi seharusnya dinilai berdasarkan tujuan realistis dan dapat dicapai bukan berdasarkan tujuan maksimal.	1. Perumusan prioritas tujuan penanggulangan bencana banjir 2. Kesesuaian tujuan dengan kebutuhan masyarakat 3. Alokasi sumberdaya 4. Pengukuran pencapaian tujuan 5. Evaluasi keberhasilan optimisasi tujuan
	Perspektif Sistem adalah dimensi yang menekankan pentingnya arti interaksi organisasi dengan lingkungan. Perspektif sistem menilai hubungan antar komponen di dalam maupun di luar organisasi saling mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan organisasi.	1. Kemampuan BPBD dalam mengenali perubahan lingkungan 2. Proses penyesuaian kebijakan, strategi, dan prosedur sesuai dengan kondisi yang berkembang. 3. Respons BPBD terhadap kondisi darurat yang tidak terduga. 4. Tanggapan atas masukan dari masyarakat ataupun pihak eksternal 5. Koordinasi antarunit di dalam BPBD

	Tekanan pada perilaku merupakan dimensi yang menekankan pentingnya perilaku pekerja dalam menentukan efektivitas organisasi. Efektivitas akan meningkat apabila tujuan pekerja dan tujuan organisasi selaras, sehingga prestasi organisasi akan terdorong.	1. Kesesuaian tujuan pegawai dengan tujuan organisasi 2. Tingkat kepuasan kerja 3. Pelaksanaan SOP dan penanggulangan bencana 4. Jalinan komunikasi dan koordinasi dengan pihak eksternal
Faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi adalah berbagai unsur, baik dari dalam maupun luar organisasi, yang menentukan sejauh mana organisasi dapat menyeimbangkan berbagai tujuan, menjalin interaksi dengan lingkungan, serta mengelola perilaku organisasi sehingga dapat menjalankan fungsi dan perannya secara optimal.	Ciri organisasi meliputi struktur dan teknologi organisasi. Efektivitas akan optimal bila teknologi tersebut selaras dengan struktur organisasi sehingga mempermudah pegawai dalam bekerja.	1. Struktur dan kejelasan pembagian tugas dan fungsi 2. Sistem pengambilan keputusan 3. Tingkat formalisasi (SOP) 4. Ketersediaan teknologi dan informasi 5. Ketersediaan pengetahuan, keahlian, dan metode kerja berbasis ilmu pengetahuan
	Ciri lingkungan merupakan gambaran kondisi eksternal dan internal yang memengaruhi operasional serta dinamika kerja organisasi.	1. Ketidakpastian lingkungan 2. Kompleksitas lingkungan sosial eksternal 3. Tekanan dari masyarakat 4. Kondusifitas lingkungan internal 5. Keamanan vs Resiko

	Ciri pekerja adalah keragaman karakter, kebutuhan, respon setiap pekerja yang dapatengaruhi efektivitas organisasi terutama melalui tingkat keterikatan pada organisasi dan prestasi kerjanya.	1. Keterikatan pegawai 2. Inisiatif dan ketanggapan pegawai 3. Kompetensi Pegawai 4. Kejelasan peran
	Kebijakan dan praktik manajemen adalah seperangkat aturan, strategi, gaya kepemimpinan, sistem komunikasi, serta mekanisme pengambilan keputusan yang diterapkan manajemen untuk mengarahkan, mengendalikan, dan mengoptimalkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan.	1. Penyusunan tujuan strategi 2. Pemanfaatan sumberdaya organisasi 3. Menciptakan lingkungan prestasi 4. Proses koordinasi dan kepemimpinan dalam pengambilan keputusan 5. Inovasi dan adaptasi

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

1.9 Argumen Penulis

Peningkatan kewaspadaan daerah terhadap suatu bencana merupakan sebuah urgensi yang hendaknya dilakukan mengingat banjir merupakan bencana yang sering terjadi di Kabupaten Demak yang berdampak signifikan terhadap masyarakat, infrastruktur, dan perekonomian daerah. Dalam konteks tersebut, BPBD sebagai lembaga yang memiliki mandat utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dituntut untuk mampu merumuskan kebijakan, strategi, dan pola koordinasi yang tepat serta adaptif terhadap kompleksitas risiko banjir. Namun, berbagai indikasi menunjukkan bahwa efektivitas BPBD dalam menjalankan fungsi tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, terutama pada aspek pengkajian risiko, perencanaan terpadu, dan koordinasi lintas pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penelitian ini dipandang penting untuk mengkaji efektivitas BPBD Kabupaten Demak dalam penanggulangan banjir guna mengidentifikasi hambatan yang dihadapi sekaligus menilai sejauh mana upaya yang telah dilakukan mampu mencapai tujuan penanggulangan bencana. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar perumusan rekomendasi dalam meningkatkan kapasitas dan kinerja BPBD sehingga dampak banjir terhadap masyarakat dapat diminimalkan secara berkelanjutan.

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Tipe Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Metode penelitian deskriptif menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian saat ini

berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. (H. Hadari Nawawi, 1995). Pendekatan deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atas data yang diperoleh dari hasil pengamatan tanpa melakukan perbandingan dengan variabel lain. Metode ini menghasilkan informasi mengenai keadaan saat ini melalui data deskriptif yang berupa kata-kata, baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis, serta melalui observasi objek penelitian. Data yang diperoleh didasarkan pada fakta-fakta yang dapat diamati secara langsung atau sebagaimana adanya. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak dalam menanggulangi bencana banjir.

1.10.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini disebut sebagai lokasi di mana peneliti mengambil foto-foto dari hal yang sedang dipelajari dalam pengaturan yang sebenarnya untuk mengumpulkan data atau informasi penting. Peneliti melakukan penelitian di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak di Jl. Bhayangkara Baru No.15, Genggongan, Mangunjiwan, Kec. Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

Pemilihan lokasi penelitian ini dipertimbangkan atas dasar sebagai berikut:

- 1) Peneliti merupakan salah satu warga Kabupaten Demak dan pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada pertimbangan kemudahan bagi penulis dalam pengumpulan data serta penelitian.

- 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan leading sektor penanganan bencana banjir di wilayah Kabupaten Demak sebagai respon dari Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak.
- 3) Peneliti mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya baik waktu maupun keuangan yang tersedia karena lokasi tersebut dapat dijangkau dengan mudah oleh peneliti.

1.10.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan yang memberikan informasi tentang data yang dibutuhkan peneliti terkait masalah penelitian dalam penelitian kualitatif. Metode purposive sampling diterapkan dalam menentukan informan penelitian ini. Menurut Sugiyono (2014), purposive sampling merupakan cara yang dapat dipakai dalam menentukan sampel yang searah dengan tujuan penelitian. Biasanya metode ini dipakai dengan pertimbangan ketersediaan informasi data primer maupun sekunder yang dapat diberikan oleh informan. Adapun informan pada penelitian ini akan berfokus pada:

- a) Pegawai BPBD Kabupaten Demak terutama Pusdalops dan Bidang Kedaruratan dan Logistik
- b) Organisasi Perangkat Daerah lain yang turut serta pada penanggulangan banjir
- c) Masyarakat yang terdampak

Berikut adalah data informan yang menjadi sumber utama dalam pengumpulan informasi dan pendalaman temuan penelitian ini:

Tabel 1. 9 Data Informan Penelitian

No	Nama (Inisial)	Keterangan
1.	SW	Analisis Kebencanaan BPBD
2.	SI	Staff Kedaruratan dan Logistik BPBD
3.	WY	Sekretaris Desa Ploso
4.	WS	Kasi Pemerintahan Desa Menur
5.	PY	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial DINSOSP2PA
6.	AN	Masyarakat terdampak

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

Pemilihan ketiga informan tersebut didasarkan pada peran dan kontribusi masing-masing dalam penanggulangan bencana. Pegawai BPBD dipilih karena memiliki peran strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penanggulangan bencana, sehingga mampu memberikan informasi mendalam terkait kebijakan, prosedur, serta kendala yang dihadapi. Relawan dilibatkan karena menjadi ujung tombak di lapangan saat bencana terjadi, sehingga dapat menyampaikan pengalaman langsung mengenai koordinasi, distribusi bantuan, dan efektivitas respons. Sementara itu, masyarakat terdampak menjadi sumber penting untuk mengetahui sejauh mana upaya penanggulangan yang dilakukan telah memenuhi kebutuhan dan harapan di lapangan. Kombinasi ketiga

narasumber ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Demak.

1.10.4 Jenis Data

Studi menggunakan data kualitatif dalam penelitian ini. Data Kualitatif merupakan data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung dan biasanya dinyatakan secara verbal daripada numerik. Moleong (2018) berpendapat bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang dialami oleh subjek, termasuk perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, dengan penekanan pada gambaran yang lengkap dan komprehensif.

1.10.5 Sumber Data

Sumber data utama untuk penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Data tambahan yang dapat digunakan sebagai bukti termasuk dokumen dan sumber data lainnya, seperti data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, data dari sumber primer dan sekunder digunakan:

- a) Data primer yang diperoleh secara langsung dari sumbernya seperti hasil observasi dan wawancara dengan narasumber mengenai efektivitas penanggulangan banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak.
- b) Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak langsung dari sumber pertama. Menurut Ruslan (2003) data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau tersedia melalui publikasi dan

informasi yang dikeluarkan di berbagai organisasi atau perusahaan. Adapun data sekunder pada penelitian ini penulis dapatkan hasil dari studi pustaka berupa dokumen-dokumen atau hasil penelitian sebelumnya mengenai efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak dalam penanggulangan banjir yang berasal dari media *online*, artikel ilmiah, *website*, buku-buku serta jurnal yang berkata kunci efektivitas organisasi, penanggulangan bencana, BPBD, dan banjir.

1.10.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memastikan data yang dikumpulkan akurat dan relevan, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data.

a) Observasi

Pengamatan langsung digunakan sebagai bagian dari pendekatan pengumpulan data yang dikenal dengan observasi untuk mencatat semua data dan informasi yang relevan dengan masalah penelitian efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak dalam menanggulangi bencana banjir.

b) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan agenda yang telah ditentukan sebelumnya. Individu yang diwawancarai dan orang yang memberikan tanggapan adalah dua peserta yang melakukan dialog. Penelitian ini menggunakan wawancara non struktural atau non direktif.

c) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi, seperti buku, artikel, angka, dan gambar, yang dapat digunakan untuk mendukung hasil penelitian. Peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan temuan penelitian ini. Selain itu, peneliti akan mengumpulkan data berupa dokumentasi foto selama proses penelitian berlangsung dan dokumentasi foto tambahan sebagai sarana evaluasi temuan penelitian.

1.10.7 Analisis dan Interpretasi Data

Dalam analisis data kualitatif, menurut Spandley (dalam Sellfia *et al.*, 2021) analisis data adalah proses berpikir dalam penelitian apa pun. Ini berkaitan dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sesuatu untuk mengidentifikasi bagian-bagiannya, hubungannya dengan keseluruhan, dan hubungannya dengan seluruhnya. Penelitian ini menggunakan metode analisis data menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yaitu analisis data yang meliputi tiga tahapan yaitu:

1) Kondensasi data

Siklus yang dilalui dalam kondensasi data, diantaranya:

a) Selecting

Pada tahap ini peneliti menyeleksi dimensi mana yang lebih penting, hubungan yang lebih bermakna dan konsekuensinya, serta informasi apa saja yang bisa dianalisa.

a) Focusing

Tahap ini merupakan tahap pra analisa. Peneliti memusatkan dan membatasi data hanya sampai yang berhubungan dengan rumusan masalah.

b) Abstracting

Tahap ini peneliti membuat ringkasan inti, proses dan pernyataan - pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap ada di dalamnya. Data yang telah terkumpul dievaluasi, utamanya berhubungan dengan kualitas dan kecukupan data.

c) Simplifying and Transforming

Tahap ini peneliti menyederhanakan dan mentransformasikan data bisa melalui sortir data melalui ringkasan singkat, pengelompokan data dalam pola yang lebih luas

2) Penyajian data

Data disajikan dalam bentuk uraian singkat, dokumen, dan kategorisasi data yang memvisualisasikan hasil analisis. Dalam penelitian kualitatif, teks naratif adalah cara yang paling umum untuk menyajikan data. Menyajikan data membuatnya lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan tahapan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3) Penarikan kesimpulan/verifikasi.

Segitiga yang saling berhubungan terdiri dari kondensasi data, penampilan data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti harus memiliki inisiatif dan mulai mengurangi, menampilkan, dan menentukan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dibuat hanyalah sementara dan akan berubah saat ditemukan bukti

yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan yang dibuat pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel.

1.10.8 Kualitas Data

Untuk menguji kualitas dan validitas data, peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah pemeriksaan kredibilitas yang dapat dilakukan dengan berbagai cara dan pada berbagai titik waktu. Triangulasi dapat dibagi ke dalam beberapa komponen, seperti:

a) Triangulasi sumber

Memperkuat kesimpulan dengan menganalisis data dari berbagai sumber.

b) Triangulasi Teknik

Metode ini menganalisis data yang sama dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data.

c) Triangulasi waktu

Cara untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dengan membandingkan data yang dikumpulkan pada waktu yang berbeda.

Teknik triangulasi sumber digunakan dalam penelitian ini, yang menguji kebenaran data dengan menganalisis sumber data penelitian yang tidak hanya berfokus pada satu informan tetapi juga hasil wawancara dari berbagai informan. Selanjutnya, data kualitatif yang diperoleh diuji dengan teknik observasi, dokumentasi, wawancara, dan studi literatur deskriptif.